



Pengelolaan TKDD dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya (PMK 17/PMK.07/2021)

Jakarta, 25 Februari 2021



1

Kebijakan *Refocusing* TKDD TA 2021



TKDD 2021

Refocusing TKDD TA 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19

DANA DESA

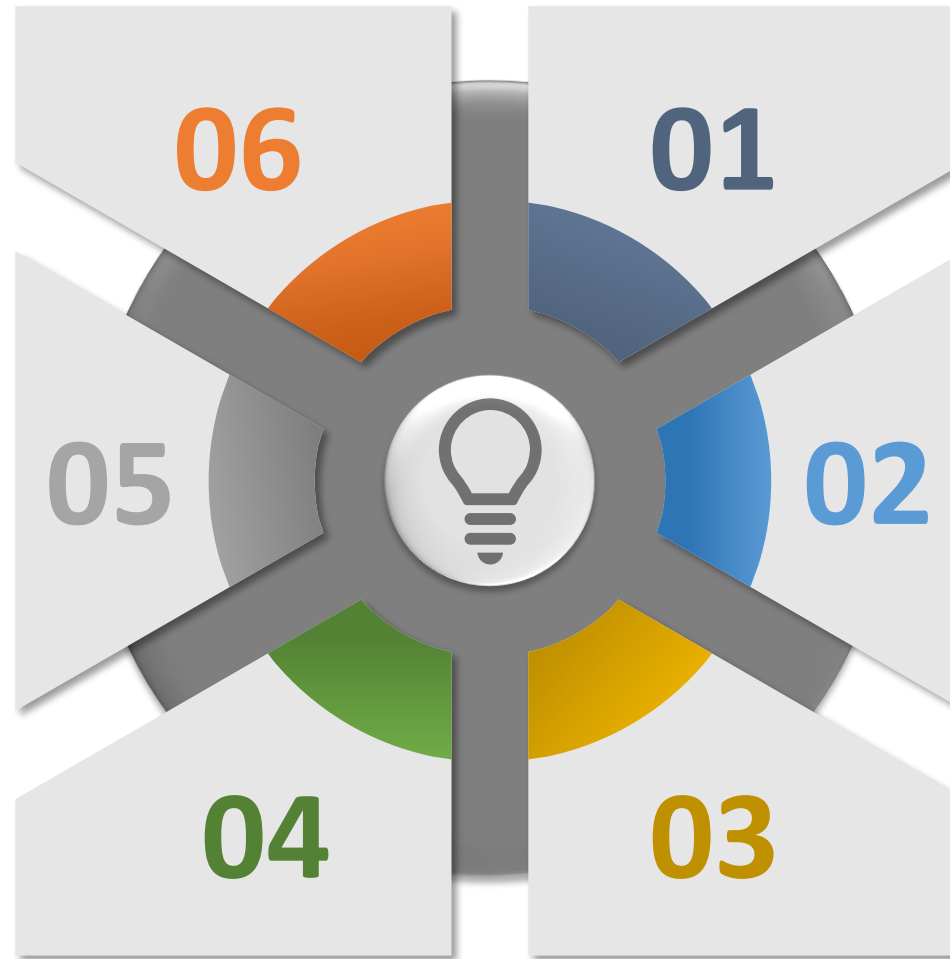
Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa melalui pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp300.000,00/KPM/bulan dan *earmarked* 8% untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 antara lain untuk aksi desa aman COVID-19

DID

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemic Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi dan pelayanan kesehatan

DAK NON FISIK

Penanganan Covid19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan



DBH

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, Innakes daerah, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19

DAU

Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Innakes daerah, mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

DAK FISIK

Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik

PMK No. 17/PMK.07/2021



2

Kebijakan Penyesuaian DTK TA 2021



REFOCUSING PELAKSANAAN DAK FISIK SECARA PADAT KARYA DALAM PMK 17/PMK.07/2021



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- ✓ Dampak Pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
- ✓ APBN masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- ✓ DAK Fisik agar dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah



PELAKSANAAN (Pasal 12)

- Kegiatan DAK Fisik belum dikontrakkan, pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk **penyerapan tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku local.**
- Berpedoman pada dokumen RK, Petunjuk Teknis, dan/atau Petunjuk Operasional DAK Fisik

Latar Belakang

- Penyerapan tenaga lokal dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN



PENYALURAN (Pasal 17)

- Persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambahkan informasi:
 1. Perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
 2. Pemutakhiran data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
- Perkiraan data jumlah tenaga kerja disampaikan pada daftar kontrak kegiatan
- Pemutakhiran data jumlah tenaga kerja disampaikan pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output melalui OMSPAN paling lambat 15 Desember 2021
- Laporan tersebut dapat diperbaharui sampai dengan penyaluran TA selanjutnya



PENYESUAIAN ALOKASI DAK FISIK 2021

(Pasal 5 PMK 17/PMK.07/2021)

BIDANG	APBN 2021	PENYESUAIAN	%
Pendidikan	Rp18.334,60	Rp18.333,06	-0,01%
Kesehatan Dan Keluarga Berencana	Rp20.781,20	Rp19.796,49	-4,74%
Perumahan Dan Permukiman	Rp1.000,00	Rp975,78	-2,42%
Industri Kecil Dan Menengah	Rp750,00	Rp743,54	-0,86%
Pertanian	Rp1.400,00	Rp1.394,26	-0,41%
Kelautan Dan Perikanan	Rp1.000,00	Rp997,12	-0,29%
Pariwisata	Rp629,85	Rp585,41	-7,06%
Jalan	Rp10.791,54	Rp10.210,34	-5,39%
Air Minum	Rp3.000,00	Rp2.977,36	-0,75%
Sanitasi	Rp2.000,00	Rp1.974,66	-1,27%
Irigasi	Rp3.000,00	Rp2.901,02	-3,30%
Lingkungan Hidup	Rp700,00	Rp606,11	-13,41%
Transportasi Perdesaan	Rp1.250,00	Rp1.248,32	-0,13%
Transportasi Laut	Rp611,01	Rp575,46	-5,82%
Cadangan		Rp329,26	
TOTAL	Rp65.248,20	Rp63.648,20	-2,45%

- Penyesuaian sebesar **Rp1,6 Triliun** (2,45% dari alokasi APBN 2021)
- Penyesuaian (alamiah) berdasarkan **nilai Rencana Kegiatan DAK Fisik** per/daerah per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh Kementerian/ Lembaga terkait
- Alokasi setelah penyesuaian : **Rp63,65 Triliun**, terdiri atas:
 - a. **Rp63,3 Triliun** = dialokasikan per daerah per bidang/subbidang;
 - b. **Rp0,33 Triliun** (unallocated per daerah) sebagai Cadangan DAK Fisik

penyesuaian tidak berpengaruh pada alokasi yg akan disalurkan karena penyesuaian dilakukan terhadap selisih antara RK dengan pagu



PENYESUAIAN ALOKASI DAK NON-FISIK 2021

1. Pagu alokasi DAK Nonfisik TA 2021 untuk jenis Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD ditetapkan sebesar Rp1,6 Triliun (semula sebesar Rp1,99 Triliun)
2. Penyesuaian **hanya di dana Cadangan TKG sehingga sama sekali tidak mengurangi hak guru atas tunjangan khusus guru**. Telah diperhitungkan mencukupi kebutuhan dalam satu tahun; dan
3. **Alokasi per daerah tidak berubah dan target output guru penerima TKG masih sebesar 34.555 guru** untuk memberikan jaminan **kepastian dalam APBD** serta **jaminan hak guru** di daerah afirmasi tetap terjaga dan terbayarkan.

TKG	Kebutuhan 2021			
	Sasaran	Anggaran	Buffer	Total
Semula	34.555 guru	1.343.466.799	641.540.201	1.985.007.000
Menjadi	34.555 guru	1.343.466.799	241.540.201	1.585.007.000



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

Percepatan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah



INSENTIF NAKES MELALUI BOK TAMBAHAN

TUJUAN : *memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berjuang untuk menangani COVID-19*

MASA PEMBERIAN : Maret s.d Desember 2020 dan dapat diperpanjang jika ada kebijakan baru terkait penanganan Pandemi Covid-19

ALOKASI : **Rp 3.700,0 miliar** dan terdapat penambahan alokasi sebesar **Rp473,33 miliar**

REALISASI :

1. Realisasi penyaluran ke Kasda Rp4.173,32 miliar (99,9%).
2. Dari Rp4.173,32 miliar yang telah salur ke Kasda, → telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan daerah seluruh provinsi/kabupaten/kota sebanyak 776.249 orang dengan total pembayaran **sebesar Rp3.045,41 miliar* (73%)**.

**Data per 10 Februari 2021*

MONITORING DAN EVALUASI:

1. Melalui aplikasi **Insentive Covid**, Kemenkes melakukan monitoring dan memandu daerah dalam menetapkan jumlah Nakes (yang dapat diberikan insentif nakes) agar sesuai Kepmenkes No.2539/2020;
2. Melalui aplikasi **Aladin** (Pelaporan DAK Nonfisik), Kemenkeu melakukan *desk monitoring* pelaporan oleh Daerah berdasarkan kesesuaian pembayaran SP2D dengan rekapitulasi-nya;
3. Pendampingan di Daerah oleh BPKP sebagai kontrol dan akuntabilitasnya.

KENDALA PELAKSANAAN:

1. Lambannya proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan revisi DPA guna menampung anggaran insentif Nakes melalui BOK Tambahan;
2. Tidak maksimalnya koordinasi teknis di tingkat Satker khususnya antara faskes di daerah (RSUD, puskesmas, labkesda) dengan Dinas Kesehatan;
3. Penganggaran dan penyaluran yang mepet di akhir tahun membuat OPD kesulitan untuk merealisasikannya



UPAYA PENYELESAIAN INNAKES 2020 (1)

ALOKASI TA 2020 : Rp 4.173,33 M



Realisasi penyaluran ke Kasda Rp4.173,32 M



Realisasi pembayaran kepada nakes Rp3.045,41 M



Perkiraan Sisa Dana di Kasda Rp1.127,90 M

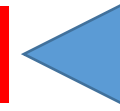
Langkah-Langkah yang sudah dilakukan:



- ➔ DJPK melalui surat nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan bahwa sisa dana BOKT TA 2020 agar segera dianggarkan kembali pada APBD 2021 dan digunakan untuk pembayaran innakes atas kinerja 2020 dan melaporkannya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
- ➔ Kemendagri melalui surat Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan Langkah-Langkah untuk penganggaran sisa dana BOKT 2020 pada APBD 2021 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020.
- ➔ Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor KU.04.01/3/0150/2021 tanggal 2 Februari meminta daerah untuk menyampaikan laporan realisasi dan kebutuhan innakes 2020 yang belum terbayarkan pada TA 2020 yang sudah diverifikasi oleh APIP daerah paling lambat 15 Februari 2021.



Daerah masih belum merespon secara cepat





UPAYA PENYELESAIAN INNAKES 2020 (2)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sumber BOK Tambahan 2020

Kinerja	Pembayaran	Action
2020	2020	YES ✓
2020	2021	YES ¹⁾ ✓
2021	2021	YES ²⁾ ✓

- 1) *carry over* 2020 yang belum dibayar dan bersumber dari sisa dana di Kasda yang dianggarkan kembali pada APBD 2021
- 2) Sisa dana BOKT 2020 yang masih ada setelah kinerja 2020 telah dibayarkan semua, dapat digunakan untuk membayarkan kinerja innakes 2021.

Sumber Earmarked DAU/DBH 2021

Kinerja	Pembayaran	Action
2020	2020	NO ✗
2020	2021	YES ³⁾ ✓
2021	2021	YES ✓

- ³⁾ *carry over* 2020 yang belum dibayar, namun tidak memiliki sisa dana di Kasda yang bersumber dari BOKT dibayarkan melalui earmarked DAU/DBH 2021

1. Kinerja 2020 yang belum dibayarkan pada tahun 2020 dapat dibayarkan menggunakan sisa dana BOKT;
2. Dalam hal sisa dana BOKT tidak mencukupi, kinerja 2020 yang belum dibayarkan pada tahun 2020 dapat dibayarkan menggunakan *earmarking* dana DAU dan/atau DBH;
3. Pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021 bersumber dari *earmarking* dana DAU dan/atau DBH dan sisa dana BOKT (apabila masih ada).



TERIMA KASIH



LAMPIRAN



Realisasi Pembayaran Insentif Nakes Daerah per Provinsi

Data per-10 Februari 2021

Sumber: aplikasi aladin

No.	Pemerintah Daerah	Total Tenaga Kesehatan	Pagu	Penyaluran dari RKUN ke RKUD	Realisasi Pembayaran	Persen	Sisa Dana
1	Se-Provinsi Aceh	16,884	82,696,190,187	82,696,190,187	39,812,123,438	48%	42,884,066,749
2	Se-Provinsi Sumatera Utara	18,581	127,337,194,774	127,337,194,774	60,050,131,261	47%	67,287,063,513
3	Se-Provinsi Sumatera Barat	19,974	98,274,909,650	98,274,909,650	79,151,376,953	81%	19,123,532,697
4	Se-Provinsi Riau	15,741	74,806,189,654	74,806,189,654	55,784,314,919	75%	19,021,874,735
5	Se-Provinsi Jambi	8,259	54,264,548,734	54,264,548,734	37,073,958,554	68%	17,190,590,180
6	Se-Provinsi Sumatera Selatan	11,165	112,112,679,897	112,112,679,897	49,784,210,717	44%	62,328,469,180
7	Se-Provinsi Bengkulu	7,301	47,765,143,972	47,765,143,972	23,989,228,126	50%	23,775,915,846
8	Se-Provinsi Lampung	18,906	106,843,988,567	106,843,988,567	82,811,776,213	78%	24,032,212,354
9	Se-Provinsi DKI Jakarta	46,139	261,210,029,783	261,210,029,783	255,753,664,858	98%	5,456,364,925
10	Se-Provinsi Jawa Barat	85,729	553,362,119,549	553,362,119,549	393,916,906,405	71%	159,445,213,144
11	Se-Provinsi Jawa Tengah	106,411	474,218,557,244	474,218,557,244	417,391,259,038	88%	56,827,298,206
12	Se-Provinsi DI Yogyakarta	18,588	73,961,598,147	73,961,598,147	67,761,475,538	92%	6,200,122,609
13	Se-Provinsi Jawa Timur	92,231	511,589,573,041	511,589,573,041	383,729,905,529	75%	127,859,667,512
14	Se-Provinsi Kalimantan Barat	18,154	103,376,112,753	103,376,112,753	82,109,978,483	79%	21,266,134,270
15	Se-Provinsi Kalimantan Tengah	9,808	73,922,838,738	73,922,838,738	44,456,982,612	60%	29,465,856,126
16	Se-Provinsi Kalimantan Selatan	16,503	106,092,711,556	106,092,711,556	86,387,928,653	81%	19,704,782,903
17	Se-Provinsi Kalimantan Timur	17,066	77,060,905,620	77,060,905,620	62,145,069,785	81%	14,915,835,835
18	Se-Provinsi Sulawesi Utara	16,576	116,417,710,185	116,417,710,185	76,328,063,100	66%	40,089,647,085
19	Se-Provinsi Sulawesi Tengah	11,359	79,896,252,243	79,896,252,243	51,810,890,229	65%	28,085,362,014
20	Se-Provinsi Sulawesi Selatan	81,569	197,390,441,364	197,390,441,364	123,435,633,619	63%	73,954,807,745
21	Se-Provinsi Sulawesi Tenggara	9,976	66,364,737,856	66,364,737,856	43,537,252,302	66%	22,827,485,554
22	Se-Provinsi Bali	14,928	70,087,773,847	70,087,773,847	63,874,184,499	91%	6,213,589,348
23	Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat	22,269	116,913,703,081	116,913,703,081	106,736,551,189	91%	10,177,151,892
24	Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	5,832	55,502,602,125	55,502,602,125	18,712,108,470	34%	36,790,493,655
25	Se-Provinsi Maluku	11,105	93,414,634,455	93,414,634,455	47,991,299,902	51%	45,423,334,553
26	Se-Provinsi Papua	13,759	79,671,107,927	79,671,107,927	47,160,839,102	59%	32,510,268,825
27	Se-Provinsi Maluku Utara	7,220	46,905,768,548	46,905,768,548	28,810,267,953	61%	18,095,500,595
28	Se-Provinsi Banten	20,647	97,830,716,334	97,830,716,334	79,851,157,297	82%	17,979,559,037
29	Se-Provinsi Bangka Belitung	5,472	31,164,410,550	31,164,410,550	18,778,233,597	60%	12,386,176,953
30	Se-Provinsi Gorontalo	3,450	24,004,050,558	24,004,050,558	14,798,771,712	62%	9,205,278,846
31	Se-Provinsi Kepulauan Riau	9,128	53,904,930,287	53,904,930,287	38,162,116,788	71%	15,742,813,499
32	Se-Provinsi Papua Barat	4,417	31,935,091,589	31,935,091,589	14,539,773,665	46%	17,395,317,924
33	Se-Provinsi Sulawesi Barat	3,988	36,766,535,983	36,766,535,983	21,215,369,836	58%	15,551,166,147
34	Se-Provinsi Kalimantan Utara	7,115	36,252,819,578	36,252,819,578	27,559,679,877	76%	8,693,139,701
Total		776,249	4,173,318,578,376	4,173,318,578,376	3,045,412,484,219	73%	1,127,906,094,157



EVALUASI PELAKSANAAN BOKT TA 2020 (1)

Range	Tingkat Realisasi	Jumlah Daerah
<26%	Rendah Sekali	98
26% s.d. 50%	Rendah	92
51% s.d 75%	Sedang	145
>=76%	Tinggi	207
Grand Total		542

- ✓ 59 daerah dengan realisasi = 0
- ✓ 39 daerah dengan penyerapan <26%

Tingkat Kinerja Penyerapan Daerah *(Based on Report)*

Data per 10 Februari 2021

Pemerintah Daerah	Pagu BOKT	Penyaluran	Total Anggaran Insentif Nakes sudah dibayarkan (Dalam Rupiah)	Jumlah dokter spesialis	Dokter Gigi / Dokter Umum	Perawat/ Bidan	Tenaga Kesehatan lainnya	Total Tenaga Kesehatan	%serap	Sisa Dana
Provinsi Jawa Barat	36,650,896,821	36,650,896,821	18,533,694,317	339	483	2,535	1,284	4,641	50.6%	18,117,202,504
Kab. Bandung	34,535,253,250	34,535,253,250	18,241,312,530	83	944	2,475	1,844	5,346	52.8%	16,293,940,720
Kab. Bogor	88,617,791,490	88,617,791,490	69,963,696,568	665	1,918	8,590	2,403	13,576	78.9%	18,654,094,922
Kab. Ciamis	25,667,600,000	25,667,600,000	7,041,150,000	-	-	-	1,994	1,994	27.4%	18,626,450,000
Provinsi Maluku	16,137,879,611	16,137,879,611	1,918,295,374	14	69	231	116	430	11.9%	14,219,584,237

5 daerah
sisa dana
terbesar

Pemerintah Daerah	Pagu BOKT	Penyaluran	Total Anggaran Insentif Nakes sudah dibayarkan (Dalam Rupiah)	Jumlah dokter spesialis	Dokter Gigi / Dokter Umum	Perawat/ Bidan	Tenaga Kesehatan lainnya	Total Tenaga Kesehatan	%serap	Sisa Dana
Kota Prabumulih	4,914,000,000	4,914,000,000	305,227,273	12	16	40	32	100	6.21%	4,608,772,727
Kab. Musi Rawas Utara	4,704,000,000	4,704,000,000	290,000,000	-	16	40	24	80	6.16%	4,414,000,000
Kab. Lebong	3,193,286,862	3,193,286,862	177,214,477	-	14	50	23	87	5.55%	3,016,072,385
Provinsi Kalimantan Tengah	3,627,272,724	3,627,272,724	127,272,727	4	-	-	-	4	3.51%	3,499,999,997
Kab. Boven Digoel	4,410,000,000	4,410,000,000	72,499,982	-	7	22	10	39	1.64%	4,337,500,018

5 daerah
penyerapan
terendah
(di luar yg
realisasinya 0)



EVALUASI PELAKSANAAN BOKT TA 2020 (2)

Range	Tingkat Realisasi	Jumlah Daerah
<26%	Rendah Sekali	98
26% s.d. 50%	Rendah	92
51% s.d 75%	Sedang	145
>=76%	Tinggi	207
Grand Total		542

- ✓ 5 daerah dengan realisasi penyerapan melebihi alokasi
- ✓ 17 daerah dengan penyerapan 100%
- ✓ 185 daerah dengan penyerapan 76%-99%

5 daerah penyerapan >100%*

Pemerintah Daerah	Pagu BOKT	Penyaluran	Total Anggaran Insentif Nakes sudah dibayarkan (Dalam Rupiah)	Jumlah dokter spesialis	Dokter Gigi / Dokter Umum	Perawat/ Bidan	Tenaga Kesehatan lainnya	Total Tenaga Kesehatan	%serap	Sisa Dana/kurang salur
Kab. Humbang Hasundutan	468,000,000	468,000,000	703,409,076	14	23	201	21	259	150.3%	(235,409,076)
Kab. Bengkulu Selatan	2,802,542,726	2,802,542,726	3,315,739,451	27	47	524	357	955	118.3%	(513,196,725)
Kab. Sekadau	1,911,000,000	1,911,000,000	4,734,000,000	36	59	496	356	947	247.7%	(2,823,000,000)
Kab. Lombok Tengah	6,624,000,000	6,624,000,000	6,656,018,817	44	170	698	727	1,639	100.5%	(32,018,817)
Provinsi Kalimantan Utara	4,879,015,821	4,879,015,821	5,148,408,347	136	195	840	265	1,436	105.5%	(269,392,526)

*Pemerintah daerah menalangi pembayaran innakes melalui APBD

Data per 10 Februari 2021